

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### **TRANSFORMASI MAHKAMAH PELAYARAN MENJADI PENGADILAN MARITIM GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM**

##### **Subjek Penelitian:**

1. Peni Pudji Turyanti, S.H., M.H (Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)
2. Adi Karsyaf, S.H., M.H (Panel Ahli dan Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)
3. Capt Frederick H Roinwowan Ant I (Panel Ahli)
4. Rizky Gustaf, S.H (Kepala Subbagian Perkara dan Persidangan Mahkamah Pelayaran)
5. Kasino, S.Sos., M.Si (Kepala Subbagian Kepegawaian Umum)
6. Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr (Kepala Subbagian Perencanaan dan Laporan)
7. Didit Iswahyuniarto, S.E (Petugas Persidangan Mahkamah Pelayaran, Staff Subbagian Administrasi Perkara dan Persidangan - Mahkamah Pelayaran)
8. Jufri Lanuru, S.E (Fungsional Umum sub Direktorat Tertib Berlayar Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan RI)
9. Ferry Hikmawan, S.T (Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai - Kementerian Perhubungan RI)
10. Erlina Setyaningtyas, S.SiT., M.A (Analisis Program Diklat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan RI)

11. Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H (Fungsional Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)
12. Dr. Sirojuddin, S.H., M.H (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Ranai)
13. Ganjil Sunarto, S.H., M.H., M.M (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)
14. Hendra Adi Pramono S.H., M.H (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)
15. Drs. Sutardjo, M.Si (Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)
16. Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H (Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan - Kantor Syahbandar Tanjung Priok)
17. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M (Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga)
18. Lutfil Anshori, M.H (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

| No | Pertanyaan penelitian   |
|----|---|
| 1. | Bagaimana latar belakang terbentuknya Mahkamah Pelayaran di Indonesia?  |
| 2. | Bagaimana kewenangan Mahkamah Pelayaran yang diberikan Peraturan Perundang-Undangan?  |
| 3. | Bagaimana pengaturan dasar hukum Mahkamah Pelayaran?  |
| 4. | Bagaimana implementasi kewenangan Mahkamah Pelayaran di lapangan?   |
| 5. | Apakah ada hambatan terkait dengan operasional Mahkamah Pelayaran yang menyangkut kewenangan? Jika ada hambatan yang seperti apa?   |
| 6. | Apakah ada kewenangan yang belum diberikan Peraturan Perundang-Undangan namun sangat dibutuhkan dalam operasional Mahkamah Pelayaran? Jika ada kewenangan yang bagaimana? |

|     |   |
|-----|---|
| 7.  | Bagaimana operasional Mahkamah Pelayaran dengan aktor internasional?  |
| 8.  | Bagaimana proses persidangan berlangsung? (Komparasi dengan PN)   |
| 9.  | Bagaimana proses perumusan keputusan?   |
| 10. | Bagaimana seharusnya bentuk Mahkamah Pelayaran yang dibutuhkan?   |
| 11. | Bagaimana proses berperkara di Mahkamah Pelayaran?  |
| 12. | Bagaimana keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Pelayaran?  |
| 13. | Apakah Mahkamah Pelayaran berpotensi atau dapat ditransformasikan menjadi Pengadilan Maritim?   |
| 14. | Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan proses transformasi?   |
| 15. | Apa yang perlu dikembangkan dari Mahkamah Pelayaran di Indonesia?   |
| 16. | Bagaimana operasional yang dibutuhkan untuk transformasi Mahkamah Pelayaran? (kedudukan, organisasi, tugas pokok dan fungsi, sistem koordinasi dan komunikasi, dan sumber daya) |
| 17. | Bagaimana produk akhir yang dibutuhkan untuk Mahkamah Pelayaran? (Putusan dan Sanksi)   |
| 18. | Apakah pernah dilakukan upaya transformasi?   |
| 19. | Apa kendala dalam proses transformasi?  |
| 20. | Bagaimana bentuk/konsep transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia?  |
| 21. | Bagaimana mengatasi kendala dalam proses transformasi?  |
| 22. | Bagaimana urgensi transformasi Mahkamah Pelayaran menjadi Pengadilan Maritim di Indonesia?  |
| 23. | Bagaimana penegakan hukum di laut Indonesia?  |
| 24. | Bagaimana efektivitas Pengadilan Perikanan di Indonesia   |

## Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**  
**UNIVERSITAS PERTAHANAN RI**  
 Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : BI/2741/IX/2021  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : Satu Lembar  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 17 September 2021

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

Di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
  - b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
  - c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
  - a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
  - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Dhimas Rudy Hartanto, NIM: 120200302007, Nomor HP: +628970882826, email: dhimasrudy@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.
4. Demikian mohon menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor  
 Universitas Pertahanan  
 Republik Indonesia  
 Fakultas Pertahanan dan  
 Keamanan Nasional,



Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29518766

Lampiran Surat Rektor Unhan RI  
 Nomor : BI 2741 /IX/2021  
 Tanggal : 17 September 2021

#### DAFTAR PEJABAT

1. Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H., Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
2. Dr. Zarof, S.H., S. Sos., M. Hum., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
3. Drs. Utut Adiarto, Komisi I DPR RI.
4. Dr. Benny Kabur Harman, S.H., Komisi III DPR RI.
5. Gilang Dhiela Fararez, S.H., LL.M., Komisi III DPR RI.
6. Kombespol Capt. Hermanta, S.H., M.M., M.Mar., Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan RI.
7. Ir. R. Agus H. Purnomo, M.M, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
8. Ir. Ahmad, M.M.Tr, QIA, C.Fr.A., Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan RI.
9. Dr. Capt. Mugen Suprihatin Sartoto, M.Sc., Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan RI.
10. Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si., Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
11. Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H., Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan RI.
12. Sri Lestari Rahayu, S.H., LL.M., Ketua Mahkamah Pelayaran RI.
13. R Totok Mukarto, S.H., CN., M.Si., Plt Sekretaris Mahkamah Pelayaran RI.
14. Kasino, S. Sos., M.Si., Plt Kasubbag Kepegawaian Umum Mahkamah Pelayaran RI.
15. Rizky Gustaf, S.H., Plt Kasubbag Perkara dan Persidangan Umum Mahkamah Pelayaran RI.
16. Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr., Plt Kasubbag Perencanaan dan Laporan Umum Mahkamah Pelayaran RI.
17. Yuliana Anastasia, S.S., M.M.Tr., Plt Kasubbag Keuangan dan Perlingkapan Umum Mahkamah Pelayaran RI.
18. Capt. Bukhari, S. H., M.Mar., Anggota Panel Ahli Umum Mahkamah Pelayaran RI.
19. Capt. Frederick H Roinwowa, Anggota Panel Ahli Umum Mahkamah Pelayaran RI.
20. Capt. Supardi, M.M., Anggota Panel Ahli Umum Mahkamah Pelayaran RI.
21. Pihak yang berperkara di Mahkamah Pelayaran RI.
22. Peni Pudji Turyani, Mantan Ketua Mahkamah pelayaran RI.
23. Prof. Dr. Hj. ETTY R. Agoes, S.H., LL.M., Guru Besar Hukum Internasional Universitas Padjadjaran.
24. Dr. Tengku Murphi Nusmir, S.H., M.H., Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia.
25. Liza Fariyah, S.H., Direktur Eksekutif Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan.

#### DAFTAR LEMBAGA

Mahkamah Pelayaran RI, Jakarta.

a.n. Rektor  
 Universitas Pertahanan  
 Republik Indonesia  
 Badan Nasional  
 Keamanan Nasional,



Yenny Susanto, S.Sos., MM., C.Fr.A  
 Marsekal Muda TNI



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI**  
**UNIVERSITAS PERTAHANAN RI**  
 Terakreditasi BAN-PT 'A'

Nomor : B/ 3551 /XI/2021  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : Satu Lembar  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 9 November 2021

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran

di

Tempat

1. Dasar:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan RI Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- b. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/240/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Program Kerja dan Anggaran Universitas Pertahanan RI Tahun Anggaran 2021.
- c. Keputusan Rektor Unhan Nomor: KEP/2157/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kalender Akademik Program Magister Universitas Pertahanan RI Tahun Akademik 2020/2021.

2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:

- a. Sebagai syarat kelulusan Program Magister Universitas Pertahanan Republik Indonesia, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis dan publikasi jurnal ilmiah yang terkait dengan program studinya.
- b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan RI a.n. Dhimas Rudy Hartanto, NIM: 120200302007, Nomor HP: +628970882826, email: dhimasrudy@gmail.com, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Transformasi Mahkamah Pelayaran Menjadi Pengadilan Maritim Guna Mewujudkan Keamanan Maritim".

3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon dapatnya diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data/angket dan keterangan termasuk melakukan Observasi Lembaga dan wawancara dengan pejabat tersebut dalam lampiran.

4. Demikian menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor  
 Universitas Pertahanan  
 Republik Indonesia  
 Dekan Fakultas Keamanan Nasional,



Pratiwi Sasir, S.Sos., MM., C.Fr.A  
 Marsekal Muda TNI

Tembusan:

1. Sekjen Kemhan RI
2. Rektor Unhan RI
3. Warek I Unhan RI
4. Kasatwas Unhan RI
5. Ka LPPM Unhan RI
6. Karo AK Unhan RI.

Jl. Salemba Raya No.14 Jakarta Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan RI  
 Nomor : B/ 3381 /XI/2021  
 Tanggal : 9 November 2021

DAFTAR PEJABAT



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
 MAHKAMAH PELAYARAN**

JL. BULEVAR GADING TIMUR  
 KELAPA GADING  
 JAKARTA 14250

TELP. (021) 4533331  
 4509166  
 FAX. (021) 4509165

Website : mahpel.dephub.go.id  
 E-mail :

Nomor : KP.114 / 16 / XI / MP.2021 Jakarta, 17 November 2021  
 Kalsifikasi : Penting  
 Lampiran :  
 Perihal : Persetujuan Permohonan Penelitian

Kepada  
 Yth : Dekan Fakultas Keamanan Nasional  
 Universitas Pertahanan  
 di  
 Tempat

1. Menujuk Surat Dekan Ketua Program Studi Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Nomor : B/2741/IX/2021 tanggal 17 November 2021 Perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Mahkamah Pelayaran memberikan Izin untuk Mengadakan Penelitian kepada Mahasiswa atas nama DHIMAS RUDY HARTANTO, NIM : 120200302007.
2. Selama mahasiswa dimaksud melaksanakan Penelitian di Kantor Mahkamah Pelayaran, agar mentaati peraturan yang berlaku di Kantor Mahkamah Pelayaran.
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Mahkamah Pelayaran  
 Sekretaris



R. Totok Mukarto O,SH.,CN.,M.Si  
 NIP. 196701221990031001

Tembusan :  
 Ketua Mahkamah Pelayaran

*"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"*



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jln. Padamarang No. 4  
Tanjung Priok  
Jakarta 14310

Telepon : (62-21) 43800054

Fax : 43931364  
43935405

Email : [sb\\_tanjungpriok@dephub.go.id](mailto:sb_tanjungpriok@dephub.go.id)  
Website : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

Nomor : um. 006 / 8 / 29 / 96 - tpik / 2021  
Klasifikasi : -  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian

Jakarta, 16 Desember 2021

Yth. Dekan Fakultas Keamanan Nasional  
Universitas Pertahanan RI

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI  
Nomor : B/3381/XI/2021 tanggal 09 November 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dapat menyetujui permohonan izin penelitian dalam rangka mendapatkan data / angket dan keterangan termasuk melakukan observasi lembaga dan wawancara pejabat dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan membawa bukti vaksin minimal tahap I (pertama) melalui aplikasi peduli lindungi.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA  
TANJUNG PRIOK



ANDI HARTONO  
NIP. 19670521 199703 1 001

Tembusan :

1. Plt. Kabag Tata Usaha Kantor Kesyahbandaran Utama Tpk;
2. Kasubbag Kepegawaian, Umum & Humas Kantor Kesyahbandaran Utama Tpk.

### Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Peni Pudji Turyanti, S.H., M.H  
(Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)



Wawancara dengan Adi Karsyaf, S.H., M.H  
(Panel Ahli dan Mantan Ketua Mahkamah Pelayaran)



Wawancara dengan Capt Frederick H Roinwonan Ant I  
(Panel Ahli – Mahkamah Pelayaran)



Wawancara dengan Rizky Gustaf, S.H  
(Kepala Subbagian Perkara dan Persidangan Mahkamah Pelayaran)



Wawancara dengan Kasino, S.Sos., M.Si  
(Kepala Subbagian Kepegawaian Umum)



Wawancara dengan Sri Indah Aprianti, S.E., M.M.Tr  
(Kepala Subbagian Perencanaan dan Laporan)



Wawancara dengan Didit Iswahyuniarto, S.E  
(Petugas Persidangan Mahkamah Pelayaran, Staff Subbagian  
Administrasi Perkara dan Persidangan - Mahkamah Pelayaran)



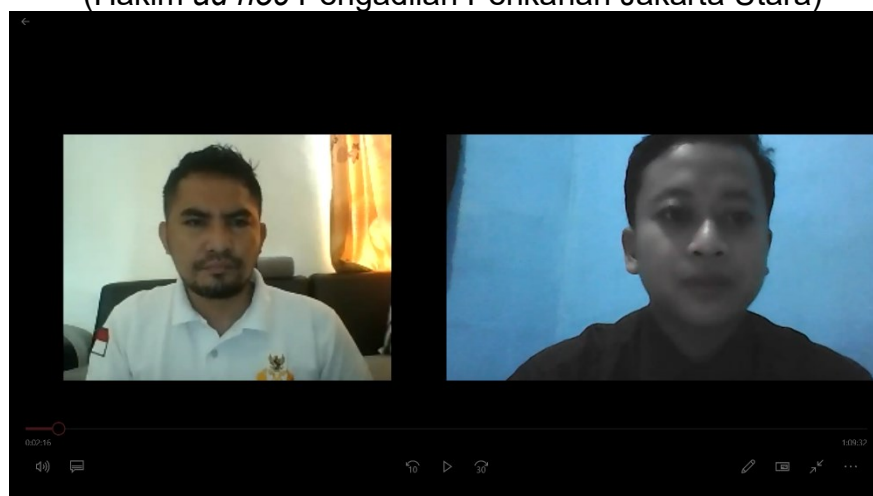
Wawancara dengan Tumbur Palti D. Hutapea, S.H., M.H  
(Fungsional Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI)



Wawancara dengan Dr. Sirojuddin, S.H., M.H  
(Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Ranai)



Wawancara dengan Ganjil Sunarto, S.H., M.H., M.M,  
Hendra Adi Pramono S.H., M.H, dan Drs. Sutardjo, M.Si  
(Hakim *ad hoc* Pengadilan Perikanan Jakarta Utara)



Wawancara dengan Jufri Lanuru, S.E

(Fungsional Umum sub Direktorat Tertib Berlayar Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Kementerian Perhubungan RI)



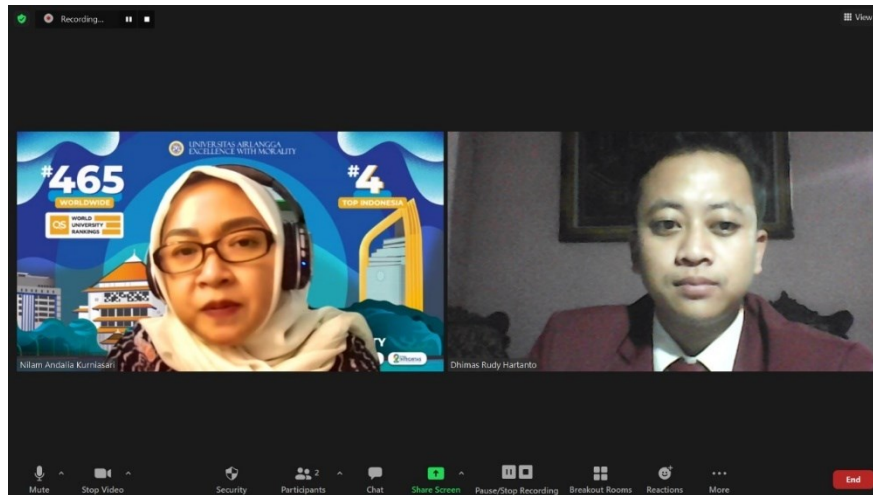
Wawancara dengan Ferry Hikmawan, S.T (Penyusun Bahan Evaluasi Kecelakaan Kapal, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai - Kementerian Perhubungan RI)



Wawancara dengan Zainal Abdul Rahman, S.H., M.H (Kepala Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan - Kantor Syahbandar Tanjung Priok)



Wawancara dengan Erlina Setyaningtyas, S.SiT., M.A  
(Analisis Program Diklat Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut – Kementerian Perhubungan RI)



Wawancara dengan Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M  
(Dosen Hukum Internasional Universitas Airlangga)



Wawancara dengan Lutfil Anshori, M.H  
(Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Ampel Surabaya)